

PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENDAMPINGAN SOSIAL

THE ROLE OF SOCIAL WORKERS IN SOCIAL ASSISTANCE

Soetji Andari

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)
Jl. Kesejahteraan Sosial Jl. Nitipuran No.1, Sanggrahan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
E-mail: soetjiandari@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang peran profesi pekerja sosial dalam pendampingan sosial. Profesi pekerja sosial di Indonesia masih dianggap suatu pelayanan karitatif yang dapat dilakukan oleh semua orang. Peran pekerja sosial seringkali diwujudkan dalam kapasitas sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah secara langsung. Peran pekerja sosial sebagai pendamping sosial berupaya mengembangkan, memelihara, dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Selain itu pekerja sosial berperan sebagai penghubung, memberikan kemudahan, serta memberikan dorongan semangat kepada penerima manfaat untuk bersikap positif, sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Profesi Pekerja Sosial sudah saatnya mendapatkan tempat dan ruang yang lebih besar di dalam penyelesaian permasalahan bangsa dengan meningkatkan keterampilan, nilai-nilai, dan metode yang dimiliki. Pekerja sosial dalam melaksanakan pendampingan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Pekerja sosial sebagai pendamping dilaksanakan dalam bentuk pemberdayaan memerlukan organisasi layanan sosial dan kinerja profesional dilaksanakan secara terpadu dan integratif. Pekerja sosial sebagai sebuah profesi mengarah kepada profesionalisme mempunyai kompetensi yang tersertifikasi memiliki acuan kerja lebih produktif dan efektif berorientasi pada kebutuhan aktual masyarakat.

Kata Kunci: peran, profesi, pekerja sosial, pendampingan sosial.

Abstract

This article aims to explain the role of the social profession in social assistance. The social worker profession in Indonesia is still considered a charitable service that can be done by everyone. The role of the social workers is often manifested in the capacity of a companion, not as a healer or direct problem solver. The role of social workers as social assistants seeks to develop, maintain and strengthen the social welfare system, so that it can meet basic human needs. In addition, social workers act as liaisons, provide convenience, and provide encouragement to beneficiaries to be positive, so they can develop their potential. It is time for the Social Worker profession to get a bigger place and space in solving the nation's problems by improving their skills, values and methods. Social workers in carrying out social assistance to improve the social functioning of individuals, families, communities, so as to improve social welfare. Social workers as assistants implemented in the form of empowerment require social service organizations and professional performance to be carried out in an integrated and integrative manner. Social workers as a profession lead to professionalism having certified competencies having a more productive and effective work reference oriented to the actual needs of society.

Keywords: role, profession, social worker, social assistance.

PENDAHULUAN

Perkembangan Profesi Pekerjaan Sosial

Profesi pekerja sosial di Indonesia masih dianggap suatu pelayanan karitatif yang dapat dilakukan oleh semua orang. Profesi pekerja sosial kurang dikenal di masyarakat karena kurangnya pemahaman dan sosialisasi tentang profesi pekerja sosial sebagai profesi pertolongan terhadap individu, kelompok yang membutuhkan. Indonesia merupakan negara besar dengan berbagai permasalahan sosial terutama masalah kemiskinan, perdagangan manusia, disabilitas, anak terlantar dan permasalahan sosial lainnya, membutuhkan pekerja sosial untuk menyelesaikan masalah sosial.

Pekerja sosial diperlukan untuk menggunakan keterampilan tingkat mikro dan makro. Mereka harus memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi orang yang mengalami ketidakadilan, hak istimewa, kekuasaan dan aset dalam masyarakat. Dengan kata lain, saat ini adalah waktu bagi pekerja sosial untuk berkomitmen untuk mengambil pendekatan berbasis hak untuk praktik kerja sosial mereka. Keterlibatan pekerja sosial pada sistem klien merasakan masalah yang muncul. Pada fase berikutnya, penilaian, pekerja sosial melihat secara holistik interaksi sistem klien dalam berbagai domain lingkungan. Bersama-sama, sistem klien dan pekerja sosial membuat daftar tujuan dan sasaran dan memutuskan siapa yang akan melakukan apa pada kapan. Pada fase implementasi, intervensi dipandu oleh tujuan dan sasaran yang telah disepakati (Kelan, 2008).

Profesi Pekerja Sosial sudah saatnya mendapatkan tempat dan ruang yang lebih besar di dalam penyelesaian permasalahan bangsa, di mana permasalahan sosial sama pentingnya dengan permasalahan lain yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian yang lebih ekstra. Pekerja sosial profesional menangani tantangan

terkait kemiskinan, tuna wisma, penyakit mental, penyalahgunaan zat terlarang, penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan, lanjut usia dan masalah sosial lainnya berhadapan dengan masalah etika. Literatur pekerjaan sosial dengan jelas menunjukkan masalah etika yang berkaitan dengan batasan yang paling bermasalah dan menantang. Masalah batas melibatkan keadaan di mana pekerja sosial menghadapi konflik aktual atau potensial antara tugas profesional seperti; hubungan sosial, seksual, agama, atau bisnis mereka. Pekerja sosial mengelola masalah batas dan risiko yang muncul dalam praktik (Reamer, 2012).

Praktik pekerjaan sosial berbasis HAM muncul sebagai alternatif pendekatan praktik yang sejak pertama kali pembentukan profesi pekerjaan sosial ini mengandalkan pada pemenuhan kebutuhan individu. Praktik pekerjaan sosial berbasis HAM perlu dikaji secara rinci, karena dalam praktik pekerjaan sosial, hak dan kewajiban memiliki implikasi yang signifikan demi tercapainya keadilan sosial bagi setiap individu. Praktik pekerjaan sosial dengan menggunakan pendekatan berbasis hak dilaksanakan berdasarkan tiga generasi hak. Pendekatan berbasis hak bagi pekerja sosial telah mengangkat harkat dan martabat klien sebagai individu dan mendorong setiap individu untuk berperan aktif dalam mengidentifikasi dan menggunakan potensi yang ada pada dirinya dan lingkungannya untuk menghadapi tantangan yang mereka alami. Praktik pekerjaan sosial berdasarkan hak membantu individu mengatasi tantangan keberfungsian sosial. Mereka memfasilitasi untuk mendapatkan keadilan. Pekerja sosial merupakan kegiatan profesional memperbaiki kemampuan mereka berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan. Siporin mendefinisikan tentang gaya praktisi pekerjaan sosial merupakan faktor yang

sangat berpengaruh terhadap efektivitas terapeutik dan merupakan cara untuk mengekspresikan kesenian kreatif praktisi. Makna dan fungsi gaya diperjelas. Gaya umum praktisi dianalisis sebagai kombinasi elemen gaya pribadi dan profesional, responsif terhadap kinerja tugas-tugas artistik dalam membantu klien. Presentasi kasus menggambarkan gaya khusus pekerja sosial. Pengaruh budaya yang lebih luas dari gaya praktisi juga pantas dikenali (Siporin, 1993).

Gaya praktisi pekerjaan sosial merupakan faktor yang sangat berpengaruh untuk efektivitas terapi dan merupakan cara untuk mengekspresikan seni kreatif praktisi. Makna dan fungsi dari gaya diklarifikasi. gaya umum praktisi dianalisis sebagai kombinasi dari unsur-unsur gaya pribadi dan profesional, responsif terhadap pertunjukan peran-tugas artistik dalam membantu klien. Presentasi kasus menggambarkan gaya khusus pekerja sosial. Pengaruh budaya yang lebih luas dari gaya praktisi juga patut mendapat pengakuan (Siporin, 1993). Model residual umumnya menyatakan bahwa pemerintah harus terlibat dalam kesejahteraan sosial hanya sebagai jaring pengaman terakhir ketika jalan lain gagal. Model kelembagaan mendukung intervensi berkelanjutan sesuai kebutuhan, melihat bantuan pemerintah sebagai kejadian alami dan normal dalam kehidupan masyarakat.

Perkembangan pekerjaan sosial melalui pendekatan pengembangan sosial menekankan peran investasi sosial dalam praktik profesional (Midgley, 2017). Pekerja sosial memenuhi kebutuhan material klien dan memfasilitasi integrasi ke dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pekerja sosial berkembang melalui kepercayaan klien bahwa kekuatan dan kemampuan ditambah dengan sumber daya dan layanan publik mereka dapat hidup produktif dan mampu memenuhi kebutuhan hidup. Praktik kerja sosial pembangunan tidak terbatas pada

organisasi komunitas atau intervensi praktik makro. Perkembangan praktik pekerja sosial dapat diimplementasikan dalam bidang utama seperti kesejahteraan anak, kesehatan mental, penuaan, bantuan sosial dan kerja sosial masyarakat. Mereka menggunakan banyak contoh inovatif dari Amerika Serikat dan negara lain untuk menunjukkan bagaimana ide-ide perkembangan dapat diimplementasikan dalam praktik kerja sosial sehari-hari (Midgley & Conley, 2010).

Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang mempunyai tanggung-jawab untuk memperbaiki dan mengembangkan interaksi antar orang, sehingga orang tersebut memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas kehidupan untuk mengatasi kesulitan yang dialami dan mewujudkan aspirasi serta nilai-nilai. Konsep ganda sumber daya dan interaksi dengan lingkungan sosial digunakan untuk menjelaskan tujuan pekerjaan sosial dan aktivitas praktisi. Pekerjaan sosial dapat dipandang sebagai profesi generalis, tetapi istilah “generalis” dan “spesialis” tidak boleh disamakan dengan praktik awal dan lanjutan (Minahan & Pincus, 1977).

Upaya yang dilakukan pekerja sosial adalah mengembangkan, memelihara, dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Fungsi ini dilaksanakan melalui usaha pekerjaan sosial dalam bentuk intervensi sosial seperti melalui pelayanan sosial, perencanaan kesejahteraan sosial, perbaikan, dan memelihara penghasilan, administrasi kesejahteraan sosial. Peranan pekerja sosial dalam bidang pengembangan kebijakan sosial dan aksi sosial di beberapa negara maju semakin diperluas, terutama yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, kesenjangan sosial, dan relasi kelompok minoritas. Pengelolaan pelayanan sosial, dalam tugas pengembangan staf, melatih dan mengelola tenaga yang dibutuhkan didalam

program kesejahteraan sosial. Tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem (Fahrudin, 2012). Bersamaan dengan itu secara terus menerus juga sedang diuji kembali dan dicoba fungsi pekerjaan sosial di bidang perbaikan penghasilan (jaminan sosial).

Pekerjaan sosial melakukan fungsi dalam mewujudkan tugas pokok sistem kesejahteraan sosial dalam suatu masyarakat untuk menjamin standar subsistensi kesehatan, dan kesejahteraan yang memadai bagi semua warga. Profesi pekerjaan sosial ditandai dengan proses membantu yang dinamis dan keragaman peran, dan fungsi. Tujuan Profesi pekerjaan sosial untuk meningkatkan kondisi masyarakat, individu, keluarga, dan kelompok - dilaksanakan di semua bidang praktik dan diwujudkan melalui berbagai metode dalam berbagai pengaturan. Untuk bekerja di lapangan, penting untuk memperoleh kerangka kerja konseptual yang membantu seseorang memahami kompleksitas praktik kontemporer mencakup (Greene, 2017):

1. Mengembangkan sumber manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar individu maupun keluarga akan perkembangan;
2. Mendistribusikan dan pemeratakan alokasi sumber-sumber sosial maupun ekonomi;
3. Mencegah timbulnya kesengsaraan, dan mengatasi kemelaratan, tekanan-tekanan sosial, serta keterlantaran; melindungi individu-individu maupun keluarga-keluarga dari bahaya-bahaya kehidupan, dan menyantuni mereka yang mengalami kehilangan karena bencana, ketidakmampuan fisik maupun mental, kecatatan, serta karena kematian.

Pekerja sosial berupaya menjadi seorang yang dapat mengoptimalkan fungsi sosial sesuai

aturan. Hal tersebut memungkinkan pekerja sosial berfungsi sebagai *to enable people to function optimally within their social institutional roles and statuses*; Membantu orang agar dapat berfungsi secara optimal di dalam institusi sosial, antara lain:

1. Mengusahakan terwujudnya potensi-potensi ke arah produktivitas dan perwujudan diri, baik pada orang-orang maupun lingkungan sosial mereka, bagi terciptanya bentuk-bentuk keberfungsian sosial baru yang kreatif dan altruistik, serta kehidupan bersama yang akrab;
2. Membantu orang-orang dalam usahanya memperoleh dan mencapai kembali tingkat kehidupan normatif yang lebih tinggi dan lebih memuaskan sebagai anggota masyarakat, dengan jalan memperbaiki kapasitas dan keterampilan yang terhambat atau kurang memadai. Upaya tersebut dengan cara memanfaatkan seoptimal mungkin sumber-sumber pelayanan yang disediakan oleh kelompok-kelompok sosial maupun institusi yang ada; dan dengan jalan mengatasi dan memecahkan kesulitan dan menjalin relasi kehidupan sosial di antara mereka;
3. Bertindak sebagai pengganti (*substitute*) bagi keluarga dan komuniti dalam menyediakan bentuk-bentuk bantuan yang bersifat suportif, substitutif, proktektif, dan preventif kepada individu maupun keluarga;
4. Mengintegrasikan orang-orang satu sama lain, menjadi perantara antara mereka, serta mempertemukan dan mengintegrasikan individu-individu dengan lingkungan sosial mereka, khususnya dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial yang tersedia.

Praktik pekerjaan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang di dalam lingkungan dalam memenuhi kebutuhannya. Fungsi pekerja sosial selain menopang dan memperbaiki tata tertib, juga

mengendalikan dan mencegah tingkah laku-tingkah laku menyimpang maupun disorganisasi agar memungkinkan terjadinya inovasi perubahan yang konstruktif; menolong orang-orang agar dapat menghindarkan diri atau keluar dari pekerjaan-pekerjaan negatif yang menyimpang dan membantu mereka agar dapat mengenali struktur maupun situasi sosial yang disfungsional.

Pekerja sosial profesional menangani tantangan yang terkait dengan kemiskinan, tunawisma, penyakit mental, penyalahgunaan zat, penyalahgunaan dan penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan, penuaan, dan masalah sosial lainnya - menghadapi berbagai masalah etika. Masalah etika dalam pekerjaan sosial melibatkan upaya untuk membantu individu, pasangan, keluarga, kelompok, organisasi, dan komunitas. Masalah etika mungkin timbul terkait kerahasiaan dan privasi; penentuan nasib sendiri klien dan paternalisme profesional; loyalitas yang terbagi; batas-batas profesional; konflik antara nilai-nilai profesional dan pribadi; mengalokasikan sumber daya yang terbatas; kepatuhan terhadap peraturan dan hukum; perselisihan buruh-manajemen; penggunaan penipuan pekerja sosial; kesalahan kolejial, ketidakmampuan, atau gangguan; dan fenomena *whistle-blowing* (Reamer, 2012).

Salah satu peran seorang pekerja sosial adalah sebagai pendamping masyarakat. Pendamping sosial merupakan tindakan sosial terhadap komunitas untuk mendampingi komunitas agar memiliki perencanaan serta melakukan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Pekerja sosial memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. Namun pada kenyataannya proses yang dilakukan tidak secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau para pekerja

sosial baik yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun perspektif profesional. Sehingga para pekerja sosial berperan sebagai pendamping sosial. Pendamping sosial pada masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya.

Pendamping sosial hadir sebagai agen perubahan sosial yang dapat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi. Pendampingan sosial dengan demikian dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti; (1) merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi, (2) memobilisasi sumber daya setempat (3) memecahkan masalah sosial, (4) menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, dan (5) menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat. Pendampingan sosial sangat menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Peran pendamping umumnya mencakup tiga peran utama, yaitu: fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya pada (Ife & Tesoriero, 2008). Peran pekerja sosial dalam melaksanakan pendampingan sosial sangat menentukan keberhasilan dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Mengacu pada keterampilan yang dimiliki pekerja sosial bersifat praktis.

PEMBAHASAN

Pengertian dan Kriteria Profesi Pekerjaan Sosial

Dalam kepustakaan terdapat berbagai batasan yang memberikan pengertian mengenai apa pekerjaan sosial itu. Beberapa batasan yang akan menjadi acuan dalam makalah ini.

Anderson dalam karangannya: “*Social Work Status and Trends*” menyatakan bahwa: Pekerjaan sosial adalah profesi yang memusatkan perhatiannya pada usaha mempermudah dan memperkokoh relasi sosial yang asasi antara individu-individu, kelompok-kelompok, dan lembaga-lembaga sosial (Anderson, 1960). Jika dibaca dengan seksama maka dalam batasan tersebut terkandung pernyataan yang tersembunyi yang mengakui bahwa di dalam masyarakat terdapat warga yang mengalami kesulitan atau gangguan dalam relasi sosial dan ada pula warga yang tidak mengalami kesulitan berelasi sosial namun sebenarnya lemah. Oleh karena itu yang tersebut belakangan ini perlu mendapat bantuan untuk memperkokoh relasi sosialnya. Dalam masyarakat masih terdapat warga lain yang dalam relasi sosialnya dengan lingkungan masyarakatnya mengalami kegagalan penyesuaian diri ataupun salah penyesuaian diri (*maladjusted*). Golongan masyarakat tersebut yang ditangani oleh pekerjaan sosial.

Batasan berikut memberikan gambaran yang lebih rinci, yang dirumuskan (Boehm, 1958) sebagai berikut:

“Pekerjaan sosial mencoba untuk mempertinggi fungsi sosial individu-individu, sendiri-sendiri dan dalam kelompok, melalui kegiatan-kegiatan yang terpusatkan pada relasi sosial yang membentuk interaksi antara manusia dengan lingkungannya. (Friedlander, 1961).

Dalam batasan kedua ini Boehm menyatakan bahwa ada individu yang mengalami kemunduran dalam fungsi sosialnya dan perlu dibantu untuk ditingkatkan. Kegiatan untuk membantu itu dipusatkan pada interelasi dan interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Setiap warga sejak kecil sudah mulai mempelajari dan berusaha untuk memahami peranan dan kedudukan sosial melalui suatu proses sosialisasi. Dalam proses tersebut warga masyarakat juga mempelajari

sanksi yang akan dikenakan kepadanya apabila dia tidak menjalankan peranan sesuai dengan kedudukannya. Setiap warga masyarakat juga mempelajari berbagai peranan yang dijalankannya dalam berbagai kelompok sosial. Dalam upaya untuk dapat melaksanakan peranan sosialnya dengan sebaik-baiknya tidak jarang seorang warga menerima teguran atau hukuman jika ia salah atau gagal menjalankan peranannya tersebut. Sebaliknya bila seseorang berhasil melaksanakan peranannya dengan baik maka akan mendapat pujian sebagai imbalan. Dengan demikian seorang warga masyarakat secara bertahap belajar untuk menjalankan berbagai peranan sosialnya sesuai dengan kedudukan dalam tatanan masyarakat. Seseorang dikatakan dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik apabila ia selalu dapat menyesuaikan diri dalam melaksanakan berbagai peranan sosialnya dalam beraneka situasi sosial. Batasan pertama menyebutkan bahwa pekerjaan sosial itu suatu profesi walaupun belum ada kejelasan profesi macam apa yang disebut pekerjaan sosial itu. Friedlander menyatakan:

“Pekerjaan sosial adalah sebuah layanan profesional, yang berlandaskan pada pengetahuan ilmiah dan keterampilan dalam hubungan insani, yang membantu individu, sendiri atau dalam kelompok, untuk memperoleh kepuasan sosial dan pribadi serta kemerdekaan (Friedlander, 1961).

Friedlander menyatakan kesejahteraan sosial tersebut antara lain dapat kita peroleh dari batasan berikut: Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari bantuan-bantuan dan lembaga-lembaga sosial, yang diciptakan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan yang penuh dan meningkatkan kesejahteraannya

selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat (Friedlander, 1961).

Pelayanan sosial bermula dari bentuk kegiatan dalam masyarakat yang mendasarkan pada ajaran kemanusiaan, atau keagamaan, atau rasa tanggung jawab terhadap sesama warga masyarakat. Pelayanan tersebut atas dasar kesukarelaan, hingga masyarakat mampu memberikan pelayanan dan bantuan secara perorangan dan kelompok. Layanan sosial tersebut di atas dikaitkan dengan upaya untuk memelihara tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Kesejahteraan dalam batasan tersebut diterima sebagai sebuah sistem yang mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan ideal dan operasional. Tujuan ideal profesi pekerja sosial adalah yang berupa usaha mempertinggi tingkatan kesejahteraan sosial manusia, sedangkan tujuan operasional tersebut tertuju kepada anggota masyarakat serta kelompok dalam masyarakat yang karena sesuatu sebab keadaannya di bawah standar. Keadaan di bawah standar ini telah menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan dirinya secara penuh. Tujuan operasional pelayanan kesejahteraan sosial harus diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk program, penyediaan sarana serta pengaturan penyalurannya.

Pembangunan nasional selalu menimbulkan dampak perubahan dari keberhasilan pembangunan itu sendiri, dan dari sejarah perkembangan manusia diperoleh gambaran individu sanggup untuk mengadakan penyesuaian diri yang memadai dan secara cepat terhadap perubahan. Demikian pula dengan profesi pekerjaan sosial, yang dikaitkan untuk mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diinginkan, maka perlu ikuti perkembangan usaha-usaha di bidang kesejahteraan sosial. Usaha kesejahteraan sosial berkembang seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Usaha kesejahteraan sosial

berkembang dari dua konsep sebagai berikut. Pandangan pertama "*the residual concept*" bahwa lembaga-lembaga kesejahteraan sosial seharusnya berperan dalam penyediaan kebutuhan sosial keluarga, dan lingkungan yang mengalami kegagalan (*The first holds that social welfare institutions should come into play only when the normal structure of supply, the family and the market break down*). Hal ini berarti bahwa bantuan baru diberikan sewaktu ada seseorang yang mengalami kegagalan untuk mencukupi kebutuhannya. Penerima bantuan itu menerima sesuatu layanan (bantuan) bukan karena dia dinyatakan berhak untuk menerimanya, tetapi menurut lingkungannya dianggap pantas untuk dibantu. Pandangan kedua, sebaliknya menganggap bahwa usaha-usaha kesejahteraan sosial adalah "fungsi pertama" yang wajar dari masyarakat industrial modern (*The second, in contrast, sees the welfare services as normal 'first line' functions of modern industrial society*) (Willensky and Lebaux, 1966). Pendapat kedua ini mengandung arti bahwa negara bertanggung jawab mengenai kesejahteraan warganya dan karena itu melalui pengaturan resmi (perundang-undangan) negara menyediakan berbagai jenis layanan sosial dari sumber-sumber yang dimilikinya atau dari sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat negara tersebut. Pandangan kedua ini menjadi asas dasar dari pembentukan negara yang mengutamakan kesejahteraan warganya (*a welfare state*). Indonesia berupaya untuk menuju ke sana, karena belum semua masyarakat menikmati pelayanan dari negara di bidang kesehatan dengan program asuransi kesehatan, sekolah gratis, sampai sekolah lanjutan dan orang menganggur menjadi tanggungan negara.

Dalam hal ini Greenwood menyatakan bahwa yang dimaksud profesi yaitu yang berkaitan dengan pekerjaan, dapat menyaring beberapa kriteria yang dapat diacu, yaitu: Sebuah profesi memiliki: (1) serumpun teori

yang sistematis, yaitu sejumlah pengetahuan yang telah diorganisasikan menjadi sebuah sistem, yang secara internal konsisten. Sistem ini menjadi dasar pelaksanaan dari profesi tersebut dalam situasi yang konkrit. Berbagai situasi kerja dalam profesi tersebut tidak mengubah tatanan penanganan pekerjaan yang harus diselesaikan menurut bidangnya; (2) terdapat kewenangan profesional, yang diperoleh melalui pendidikan. Kewenangan tersebut akan membedakan seorang tenaga profesional ini memiliki kewenangan untuk menyampaikan gagasan dan pendapat profesional di mana diperlukan; (3) Persetujuan (*sanctions*) dari masyarakat yang berupa pengakuan terhadap profesi ini, baik dinyatakan secara resmi atau pun tidak resmi, yang memberikan kesempatan bagi tenaga profesional untuk melakukan tugasnya, serta memperoleh hak dan kewenangan profesionalnya; (4) kode etik yang mengatur perilaku etik dari warga profesi tersebut, serta pelaksanaan pekerjaannya; (5) kebudayaan profesional yang menjadi ciri dari ikatan profesi tersebut. Kebudayaan profesi ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai, norma, dan lambang profesi tersebut (Kidneigh, 1966).

Pekerjaan sosial merupakan profesi yang menggunakan ilmu terapan yang bersumber pada berbagai ilmu-ilmu sosial yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam lingkungan sosial dan alamnya. Demokrasi yang tumbuh di dalam masyarakat ikut mewarnai praktik pekerjaan sosial sebagai profesi. Pekerjaan sosial semakin menjadi sadar akan penerapan prinsip-prinsip demokratis dengan semakin tambah memahami perilaku manusia dan mengenai proses sosial yang dialami setiap warga masyarakat.

Pekerjaan sosial merupakan institusionalisasi dari berbagai kegiatan kemanusiaan yang tumbuh dalam masyarakat. Nilai adalah unsur kebudayaan yang dihayati

bersama oleh warga masyarakat. Menurut Compton dan Beulah ada dua nilai utama yang mendasari profesi pekerjaan sosial, yaitu: (1) kepercayaan terhadap keunikan dan martabat yang melekat pada seorang individu, dan (2) kepercayaan terhadap hak untuk menentukan sendiri bagi diri klien sendiri (*self-determination*). Kedua jenis nilai itu perlu ditelaah secara mendalam sebelum dijabarkan secara operasional (Compton dan Galawy, 1979).

Pendampingan Sosial Merupakan Tuntutan Profesionalitas Pekerja Sosial

Berkembangnya pembangunan sosial sebagai pembangunan alternatif telah menjadi peluang semakin dibutuhkannya profesi pekerjaan sosial. Profesi ini tidak terbatas sebagai suatu profesi pelayanan kemanusiaan. Tetapi menjadi profesi yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pelayanan sosial sebagai dasar utama dalam menghadapi perkembangan pembangunan dan permasalahan sosial yang semakin kompleks. Sasaran pelayanannya pun tidak terbatas pada individu, kelompok atau masyarakat yang bermasalah, tetapi akan mengarah kepada perubahan secara berencana pada struktur sosial masyarakat secara menyeluruh. Artinya, yang menerima pelayanan pekerjaan sosial bukan hanya penyandang masalah, tetapi semua orang. Oleh sebab itu pendampingan sosial merupakan strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial yaitu “membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri”.

Pemberdayaan masyarakat dibutuhkan partisipasi publik yang kuat. Dalam konteks tersebut, peranan seorang pekerja sosial seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukannya sebagai penyembuh atau pemecahan masalah (*problem solver*) membangun serta memberdayakan

masyarakat melibatkan suatu proses dan tindakan sosial di mana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan juga tindakan kolektif guna memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Proses tersebut tidak akan muncul secara otomatis, namun tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat atau pihak luar, atau pekerja sosial baik itu yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun perspektif profesional. Oleh sebab itu pendampingan sosial dapat diartikan sebagai interaksi yang dinamis antara kelompok penyandang masalah sosial dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti:

1. Merancang perbaikan kehidupan sosial ekonomi;
2. Memobilisasi sumber daya setempat;
3. Memecahkan masalah sosial;
4. Menciptakan dan membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat.

Penyandang masalah sosial dan lingkungannya merupakan sistem sosial yang aktif dan tidak pasif, mereka memiliki kekuatan positif dan bermanfaat untuk meningkatkan keberfungsian sosial serta mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. (Suharto, 2004). Pada kenyataannya terdapat kerancuan pemahaman masyarakat akan tugas fungsi pekerja sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang diartikan sebagai tugas kemasyarakatan (*Social Task*) yang ditandai oleh doktrin pemberian pertolongan karitatif. Kerancuan pemahaman seperti ini terbukti pada program pemberian nasi bungkus kepada masyarakat miskin yang terkena PHK. Program tersebut mencerminkan suatu kegiatan bakti.

Dinamika pekerjaan sosial terus berkembang terutama dalam turut mengambil bagian penting dalam pembangunan sosial menuju kesejahteraan sosial. Dubois dan Miley (1992) menyebut beberapa tujuan pekerjaan sosial yang dengan tegas telah menyiratkan dinamika itu sendiri, yaitu: (1) Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memecahkan masalah-masalahnya agar lebih mampu melaksanakan fungsi-fungsi dirinya secara efektif; (2) Menghubungkan orang yang dilayani dengan berbagai sumber yang dibutuhkan; (3) Memperbaiki jaringan-jaringan wadah pelayanan sosial; serta (4) Meningkatkan keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial (Dubois dan Milley, 1992).

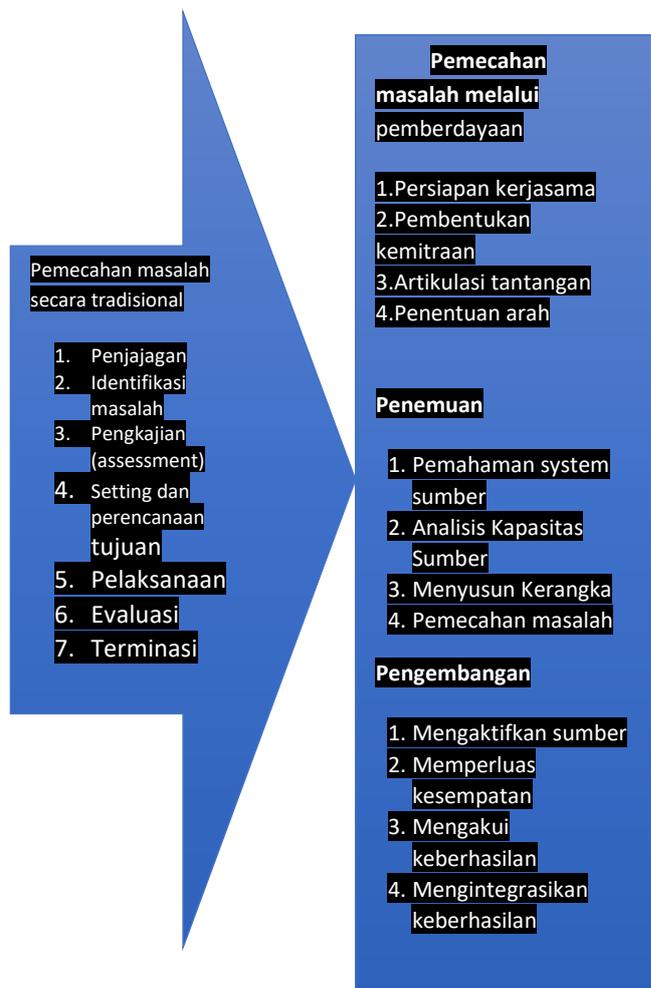
Pekerjaan sosial profesional dewasa ini sudah jauh dari konsep cikal bakalnya, walaupun dalam konsep pekerjaan sosial modern kemauan dan kemampuan merasakan penderitaan orang lain masih merupakan faktor yang mendasari. Konsep Pekerjaan sosial modern mencakup tiga komponen yaitu: (1) pengetahuan, (2) keterampilan, (3) sikap atau nilai profesional, yang ketiganya perlu ditumbuh kembangkan melalui proses pendidikan profesional formal. Pekerjaan sosial modern dewasa ini lebih mendasarkan kepada konsep-konsep dan teori keilmuan khususnya ilmu tentang manusia dan lingkungannya. Dari segi pendekatannya pekerjaan sosial telah bergeser pendekatannya sebagai berikut:

1. Dari pendekatan kasus kepada pendekatan administratif (perencanaan dan kebijakan sosial);
2. Dari pendekatan mikro (perseorangan, keluarga, kelompok kecil) kepada pendekatan makro (*intervensi pada policy decision*);
3. Dari pendekatan kuratif rehabilitatif kepada pendekatan pencegahan dan pengembangan;
4. Dari pendekatan spesifik kepada pendekatan generalistik.

Profesi pekerjaan sosial sebagai profesi penyangga usaha-usaha kesejahteraan sosial baik metoda maupun pendekatannya telah mengalami pergeseran merespon kebutuhan dan tantangan pergeseran serta kemajuan konsep praktik usaha kesejahteraan sosial. Sebagaimana disinggung di atas, pengertian pekerjaan sosial mengalami perluasan atau ekspansi dari “tradisional” menuju “kontemporer”. Pola-pola pelayanan tradisional selama ini lebih dominan karena ilmu pekerjaan sosial belum berkembang, lapangan pelayannya lebih terfokus pada individu dan kelompok residual dengan nuansa remedial. Kelemahan dari pola tradisional ini adalah kurang mampu mengakses populasi yang besar dan biayanya relatif mahal. Sebagai ilmu atau profesi yang dinamis pekerjaan sosial terbukti mampu mengembangkan pola-pola pelayannya hingga profesi ini menjadi eksis dalam pelayanan masyarakat (*Community development*).

Pelayanan kontemporer melalui strategi pemberdayaan menjadi kata kunci yang mewarnai hampir semua metoda pelayanan pekerjaan sosial. Namun demikian pendekatan tradisional bukan berarti ditinggalkan, sebab pendekatan tradisional masih tetap bermanfaat dan efisien dalam konteks pelayanan individu yang berbasis lembaga. Ekspansi pelayanan dari tradisional ke kontemporer digambarkan oleh Dubois dan Miley (1992) pada Gambar 1 sebagai berikut.

Gambar 1. Perkembangan Strategi Pemecahan Masalah Tradisional Menuju Pemberdayaan



Gambaran ekspansi pelayanan dari tradisional ke kontemporer oleh Dubois dan Miley (2005).

Pemberdayaan berarti menampilkan peran aktif dan kerjasama bagi klien atau penerima pelayanan dan mitranya. Secara paradoks “memberdayakan sistem lain” atau secara paternalistik melimpahkan kekuatan kepada orang lain berarti pula sebagai upaya pemberdayaan. Menurut (Payne, 1997) pemberdayaan pada hakikatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Pemberdayaan

merupakan aktivitas reflektif, suatu proses yang dapat dimulai dan dipertahankan hanya oleh agen atau subyek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri, sementara proses lainnya hanya dengan memberikan iklim, hubungan sumber dan alat yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat.

Pemberdayaan merupakan sistem yang berinteraksi dengan lingkungan sosial dan fisik. (Maluccio N. & Libassi F., 1984) praktik pekerjaan sosial memandang penerima pelayanan sebagai mitra kolaboratif, sebagai orang yang memiliki segala aset dan potensi. Kebutuhan pedoman praktik yang membantu pekerja sosial menggunakan penilaian sebagai sarana untuk menyoroti kekuatan aktual atau potensial dalam klien dan lingkungan mereka. Pedoman tersebut disarankan melalui klarifikasi kompetensi, proses mengidentifikasi dan memahami kapasitas seseorang untuk menghadapi tantangan di lingkungannya. Klarifikasi kompetensi pekerja sosial melalui upaya positif berbagai potensi manusia dan mempertinggi kesadaran pekerja akan gaya coping yang unik serta peran yang dimainkan lingkungan dalam fungsi sosial. Mereka mengharapkan pekerja sosial sebagai seorang profesional yang memberikan informasi penting untuk klien dalam mencapai tujuan-tujuannya, serta menjajaki proses pengembangan dan melaksanakan tugas-tugas adaptifnya. Prinsip-prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial adalah:

1. Setiap masalah dipandang sebagai tantangan bersama yang harus dihadapi;
2. Orientasi terhadap masalah simultan dengan orientasi terhadap sumber kekuatan;
3. Semua proses ditujukan untuk menghasilkan yang terbaik di masa depan;
4. Bentuk relasi antar aktor bersifat kolaboratif;
5. Posisi antar aktor berupa kemitraan.

Pemberdayaan tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi kepada komunitas secara kolektif, dan semua itu harus menjadi bagian dari aktualisasi eksistensi manusia dan kemanusiaan. Dengan kata lain manusia dan kemanusiaanlah yang menjadi tolok ukur normatif.

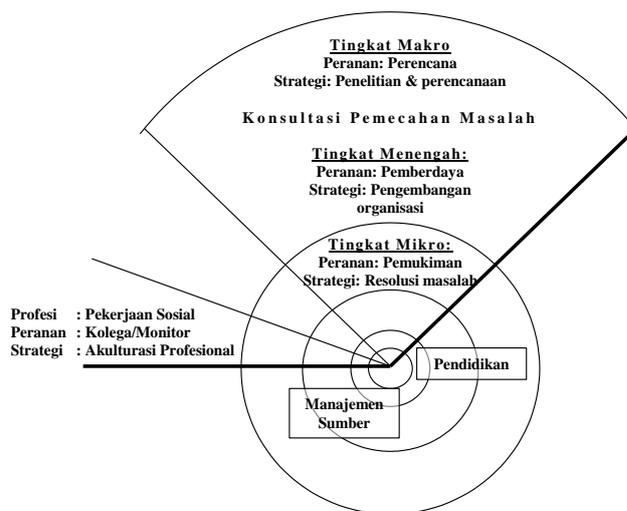
Profesi pekerja sosial saat ini belum mendapat apresiasi dari masyarakat luas secara proporsional. Hal ini boleh jadi karena keberadaan profesi ini belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Banyak anggota masyarakat bahkan para pejabat tinggi negara tidak mengetahui apa sebenarnya yang ditangani oleh pekerja sosial. Saat ini terjadi perkembangan yang sangat besar dalam perjalanan profesi ini, yaitu munculnya pendekatan *generalis-generalist social work* (Wells, 1989). Pendekatan ini tidak lagi memandang suatu persoalan secara dikotomis, juga tidak menerapkan suatu pendekatan secara terkotak misalnya bimbingan sosial perorangan. Pekerjaan sosial *generalist* ini muncul sebagai respon terhadap permasalahan sosial yang semakin sistemik, sehingga penanganannya pun harus komprehensif. Dalam setiap penanganan suatu masalah atau dalam pelaksanaan program pemberdayaan, pekerja sosial akan selalu memperhatikan keterkaitan beberapa unsur yaitu manusia, organisasi, komunitas, sumber, serta kebijakan sosial yang ada. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pendekatan pekerjaan sosial kontemporer bukan lagi cenderung bersifat penyembuhan dan rehabilitatif sebagaimana citra yang melekat selama ini. Metode penyembuhan kasus yang bertumpu kepada konsep psikoterapi dan psikiatrik (intervensi mikro) telah bergeser kepada metode pengembangan masyarakat, peranan kebijakan sosial (intervensi makro) yang bertumpu pada konsep-konsep ilmu sosial, administrasi dan manajemen.

Zastrow menyatakan bahwa pelayanan sosial akan lebih berhasil dan efektif dengan model pendekatan ekologis, pada hakekatnya sasaran pelayanan pekerjaan sosial tidak hanya mengarah pada permasalahan individu, kelompok, atau masyarakat, tetapi menjangkau luas kepada sistem keluarga, sistem politik, sistem ketenagakerjaan, sistem keagamaan, sistem pendidikan dan sistem sosial lainnya (Zastrow, 1978). Penanganan masalah sosial melalui pelaksanaan program-program pemberdayaan, pekerja sosial harus memperhatikan keterkaitan beberapa unsur yaitu manusia, organisasi, komunitas sumber, serta kebijakan sosial.

Praktik pekerjaan sosial menurut Gray dan Bernstein (1996) menawarkan ringkasan singkat tentang konsep level pekerjaan sosial yang berbeda. Praktik kerja sosial dilaksanakan berbagai tingkat, pekerja sosial bekerja dengan individu, pekerja sosial bekerja dengan keluarga dapat bersifat terapi atau klinis, dan pekerja sosial bekerja dengan masyarakat (melalui kelompok orang atau melakukan advokasi atas nama kepentingan kelompok). Pada tingkat kebijakan untuk mengubah kebijakan dan praktik yang tidak adil agar mencapai distribusi sumber daya yang lebih adil dan merata, ada tiga tingkat praktik kerja sosial yang diakui secara luas: mikro, mezzo (meso), dan pekerjaan sosial makro. Meskipun level ini sering dibicarakan seolah-olah mereka berbeda, penting untuk mengenali bahwa “level yang berbeda” terjadi bersamaan dan secara konstan memengaruhi level lain.

Pekerjaan sosial merupakan profesi berkaitan dengan permasalahan interaksi antara orang dengan lingkungan sosial agar mereka mampu melaksanakan tugas kehidupan, serta mewujudkan aspirasi. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu strategi pekerjaan sosial, menurut (Dubois & Miley, 2005) dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Strategi Pekerjaan Sosial dalam Pemecahan Masalah



Gambar 2. Contoh fungsi konsultasi pemecahan masalah (Sumber: Du Bois and Milley (2005))

Dari Gambar 2 dapat dikatakan bahwa ada tiga skala pelayanan pekerja sosial yaitu skala mikro yaitu pelayanan pada individu dan keluarga, seorang pekerja sosial harus mampu menampilkan peranan sebagai pendamping yang bersama-sama dengan keluarga dan individu penyandang masalah berupaya menemukan masalah, kebutuhan serta pilihan-pilihan untuk mengatasi permasalahannya. Kemudian pada skala menengah dalam hal ini kelompok dan organisasi sosial, maka pekerja sosial harus berperan sebagai mediator yang mampu menyusun jaringan kemitraan dengan berbagai pihak. Bertugas menjembatani antara masyarakat lokal dengan berbagai sumber yang ada. Dalam kegiatan tersebut pekerja sosial berperan memfasilitasi masyarakat, menjangkau sistem sumber di satu pihak dan juga menjalin jaringan kerja dengan sistem sumber tersebut. Dengan cara ini akan terjadi keterkaitan sinergis antara kebutuhan dengan sumber yang tersedia. Selanjutnya pada skala makro, yang menjadi penerima pelayanan adalah komunitas dan masyarakat maka pekerja sosial akan bekerja menyusun jaringan sosial, untuk mengadakan

perubahan sosial untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Ia akan melakukan berbagai rumusan kebijakan, dan instrumen yang dapat membuka kunci keadilan sosial, alokasi sumber secara merata, program-program yang memungkinkan terciptanya perlindungan dan jaminan sosial). Pada tingkat menengah berperan sebagai fasilitator dengan upaya mengembangkan jaringan sumber yaitu organisasi-organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk membantu memecahkan masalah. (Dubois and Milley, 1996).

Fungsi Dan Peranan Pendamping Sosial Dalam Profesi Pekerjaan Sosial

Fungsi Pendamping Sosial

Secara umum fungsi dan peranan pekerja sosial dalam pendekatan *generalist* yang sangat digemari akhir-akhir ini adalah sebagai pendamping sosial dalam melaksanakan pemberdayaan (*empowerment*). Adapun bidang tugasnya dan fungsinya meliputi:

Fungsi Pemungkinan (*Enabling*) atau Fasilitasi. Merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan pemberian kesempatan bagi masyarakat. Beberapa tugas pekerja sosial yang berkaitan dengan fungsi ini adalah melakukan mediasi dan negosiasi, membangun konsensus bersama, serta melakukan manajemen sumber. Program penanganan masalah sosial pada umumnya diberikan pada anggota masyarakat yang tidak mampu mengakses sistem sumber yang sulit dijangkau, karena alasan ekonomi ataupun birokrasi. Seorang pendamping sosial harus mampu memobilisasi serta mengkoordinasikan sistem sumber agar potensi sistem sumber tersebut dapat dijangkau oleh klien. Adapun yang dimaksud sistem sumber adalah: (1) Sistem sumber personal meliputi: pengetahuan, motivasi, pengalaman hidup dari penyandang masalah; (2) Sumber interpersonal meliputi sistem pendukung yang lahir dari jaringan

pertolongan, maupun sebagai proses interaksi formal dengan orang lain; (3) Sistem sumber sosial meliputi respon kelembagaan yang mendukung kesejahteraan klien maupun masyarakat di lingkungannya. Selain fungsi dan peran di atas seorang pendamping sosial harus mampu melaksanakan manajemen pelayanan sosial, dalam pengertian Pelaksanaan pengkoordinasian, pensistemasan, pengintegrasian, bukan pengawasan dan penunjukkan. Namun lebih mengarah pada pembimbingan, kepemimpinan, kolaborasi dengan pengguna atau penerima program pemberdayaan masyarakat.

Fungsi Sebagai Pemberi Penguatan. Fungsi ini berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan untuk memperkuat kapasitas masyarakat (*Capacity Building*). Pendamping seharusnya berperan aktif sebagai agen yang mampu memberikan masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, juga bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat didampinginya. Pendamping sosial harus mampu membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan pada masyarakat adalah beberapa tugas dan fungsi pendamping sosial sebagai penguat. Pendidikan sangat terkait dengan pencegahan berbagai kondisi yang menghambat kepercayaan diri individu, serta kapasitas individu. Proses pembelajaran pemberdayaan merupakan proses saling ketergantungan serta saling membutuhkan satu sama lain.

Fungsi Sebagai Pemberi Perlindungan. Fungsi ini berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal demi untuk masyarakat yang didampinginya. Pendamping sosial sebagai pekerja sosial bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, serta membangun

jaringan kerja. Fungsi pemberi perlindungan juga menyangkut tugas pendamping sebagai konsultan, orang yang bisa diajak berkonsultasi dalam pemecahan masalah. Konsultasi pemecahan masalah tidak hanya berupa pemberian dan penerimaan saran, namun merupakan proses yang ditujukan untuk pemahaman yang lebih baik serta pilihan penanganan. Konsultasi dilakukan merupakan bentuk kerjasama yang saling melengkapi dalam proses pemecahan masalah. Dalam proses pemecahan masalah, maka pendampingan sosial dalam praktik pekerjaan sosial melalui tahapan antara lain:

1. Pemahaman kebutuhan klien;
2. Perencanaan dan penyeleksian program;
3. Penerapan program;
4. Evaluasi dan pengakhiran.

Fungsi Sebagai Pemberi Pendukung. Berdasarkan aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang mendukung terjadinya program positif dari masyarakat. Maka seorang pendamping sosial dituntut, tidak hanya mampu menjadi manajer perubahan yang mengorganisasi kelompok, tetapi juga mampu melaksanakan tugas teknis sesuai dengan keterampilan dasar, antara lain:

1. Analisis sosial;
2. Mengelola dinamika kelompok;
3. Menjalin relasi;
4. Bernegosiasi dan komunikasi;
5. Mencari serta mengatur sumber dana.

Dengan fungsi tersebut di atas maka sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak memperhitungkan kehadiran pekerja sosial dalam pembangunan. Berdasarkan pengertian tersebut menjadi jelas bahwa pekerja sosial tidak seharusnya menjadi profesi yang hanya dimonopoli oleh lembaga instansi pemerintah, tetapi juga bisa ditekuni oleh lembaga-lembaga atau institusi-institusi lain yang memiliki fungsi memperkokoh relasi sosial, termasuk di

dalamnya lembaga non pemerintah seperti halnya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi sosial).

Pada hakikatnya menurut teori yang dikemukakan Zastrow tersebut di atas masalah kesejahteraan sosial akan lebih efektif apabila berupa usaha suatu tim yang terpadu dan mengedepankan sifat holistik. Terlebih-lebih di masa krisis multidimensional saat ini, di mana diperlukan usaha pemecahan masalah secara terintegrasi atau terpadu dengan pemahaman secara mendalam. Oleh sebab itu berbagai kelompok profesional seperti halnya psikiater, psikolog, perawat, pengacara, guru, dokter dan perencana sosial, ahli terapi rekreasi, dan ekonom merupakan salah satu bentuk tim kerja tercapainya pembangunan kesejahteraan sosial secara efektif. Hal ini mudah dipahami karena pekerja sosial sebagai pendamping sosial, menurut Zastrow, memegang tujuh peranan, yaitu: (1) sebagai *enabler* yang membantu masyarakat mengartikulasikan kebutuhan masyarakat, (2) sebagai *broker* yang menghubungkan individu dan kelompok yang membutuhkan pelayanan, (3) sebagai pengacara yang mengorganisasikan masyarakat/kelompok yang memerlukan bantuan dalam arti advokasi, (4) sebagai aktivis yang mencoba menstimulasikan kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged group*), (5) sebagai ahli/pakar yang memberikan usulan bagaimana struktur organisasi yang bisa dikembangkan oleh masyarakat dan kelompok, (6) sebagai pendidik masyarakat, dan (7) sebagai perencana sosial (*sosial planner*) yang mengumpulkan dan menganalisis data dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional (Zastrow, 1989).

Peran Pendamping Sosial

Selanjutnya menurut Parsons pendamping sosial harus mampu melaksanakan lima peran, seorang pekerja sosial yang berperan sebagai berikut (Parsons, Ruth J., 1994).

Peran Pendamping Sosial Sebagai Fasilitator. Dalam literatur pekerjaan sosial, peranan fasilitator sering disebut sebagai pemungkin (*enabler*). Keduanya bahkan sering dipertukarkan satu sama lain (Barker, 2017) memberi definisi pemungkin atau fasilitator sebagai tanggung jawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional. Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian danendorongan kekuatan-kekuatan personal dan aset-aset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya (Barker, 1987). Pengertian ini didasari oleh visi pekerjaan sosial bahwa “setiap perubahan terjadi pada dasarnya dikarenakan oleh adanya usaha-usaha klien sendiri, dan peranan pekerja sosial adalah memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati memberikan kerangka acuan mengenai tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial (Parsons, Ruth J., 1994):

1. Mendefinisikan keanggotaan atau siapa yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Mendefinisikan tujuan keterlibatan;
3. Mendorong komunikasi dan relasi, serta menghargai pengalaman dan perbedaan-perbedaan;
4. Memfasilitasi keterikatan dan kualitas sinergi sebuah sistem: menemukan kesamaan dan perbedaan;
5. Memfasilitasi pendidikan: membangun pengetahuan dan keterampilan;
6. Memberikan model atau contoh dan memfasilitasi pemecahan masalah bersama: mendorong kegiatan kolektif;

7. Mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dipecahkan;
8. Memfasilitasi penetapan tujuan;
9. Merancang berbagai solusi alternatif;
10. Mendorong pelaksanaan tugas;
11. Memelihara relasi system;
12. Memecahkan konflik.

Peran Pendamping Sosial Sebagai Broker. Dalam pengertian umum, seorang broker membeli dan menjual saham dan surat berharga lainnya di pasar modal. Seorang broker berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dari transaksi tersebut sehingga klien dapat memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Pada saat klien menyewa seorang broker, klien meyakini bahwa broker tersebut memiliki pengetahuan mengenai pasar modal, pengetahuan yang diperoleh terutama berdasarkan pengalamannya sehari-hari.

Dalam konteks pendampingan sosial, peran pekerja sosial sebagai broker tidak jauh berbeda dengan peran broker di pasar modal. Seperti halnya di pasar modal, terdapat klien atau konsumen. Namun demikian, pekerja sosial melakukan transaksi dalam pasar lain, yakni jaringan pelayanan sosial. Pemahaman pekerja sosial yang menjadi broker mengenai kualitas pelayanan sosial di sekitar lingkungannya menjadi sangat penting dalam memenuhi keinginan kliennya memperoleh “keuntungan” maksimal.

Dalam proses pendampingan sosial, ada tiga prinsip utama dalam melakukan peranan sebagai broker:

1. Mampu mengidentifikasi dan melokalisir sumber-sumber kemasyarakatan yang tepat;
2. Mampu menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara konsisten;
3. Mampu mengevaluasi efektivitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan klien.

Peranan sebagai broker mencakup “menghubungkan” klien dengan barang-barang dan pelayanan dan mengontrol kualitas barang dan pelayanan tersebut. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan peran sebagai broker, pendamping sosial harus mampu menghubungkan (*linking*), barang-barang dan pelayanan (*goods and services*) dan pengontrolan kualitas (*quality control*) (Parsons, Ruth J., 1994).

1. *Linking* adalah proses menghubungkan orang dengan lembaga-lembaga atau pihak-pihak lainnya yang memiliki sumber-sumber yang diperlukan. *Linking* juga tidak sebatas hanya memberi petunjuk kepada orang mengenai sumber-sumber yang ada. Lebih dari itu, ia juga meliputi memperkenalkan klien dan sumber referal, tindak lanjut, pendistribusian sumber dan menjamin pelayanan sosial yang akuntabel.
2. *Goods* adalah barang-barang yang nyata, seperti makanan, uang, pakaian, perumahan, obat-obatan. Sedangkan *services* mencakup keluaran pelayanan lembaga yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan hidup klien, semisal perawatan kesehatan, pendidikan, pelatihan, konseling, pengasuhan anak.
3. *Quality Control* adalah proses pengawasan yang dapat menjamin bahwa produk-produk yang dihasilkan lembaga memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Proses ini memerlukan monitoring yang terus-menerus terhadap lembaga dan semua jaringan pelayanan..

Dalam melaksanakan peran sebagai broker, ada dua pengetahuan dan kerampilan yang harus dimiliki oleh pekerja sosial:

1. Pengetahuan dan keterampilan melakukan asesmen kebutuhan masyarakat (*community needs assessment*), yang meliputi:
 - a. Jenis kebutuhan.
 - b. Distribusi kebutuhan;
 - c. Kebutuhan akan pelayanan;

- d. Pola-pola penggunaan pelayanan;
 - e. Hambatan dalam menjangkau pelayanan.
2. Pengetahuan dan keterampilan membangun konsorsium dan jaringan antar organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk:
 - a. Memperjelas kebijakan-kebijakan setiap lembaga;
 - b. Mendefinisikan peranan lembaga-lembaga;
 - c. Mendefinisikan potensi dan hambatan setiap lembaga;
 - d. Memilih metode guna menentukan partisipasi setiap lembaga dalam memecahkan masalah sosial masyarakat;
 - e. Mengembangkan prosedur guna menghindari duplikasi pelayanan;
 - f. Mengembangkan prosedur guna mengidentifikasi dan memenuhi kekurangan pelayanan sosial.

Peran Pendamping Sosial Sebagai Mediator. Pendamping sosial harus melakukan peran mediator dalam berbagai kegiatan pertolongannya. Peran ini sangat penting dalam paradigma generalis. Peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Lee dan Swenson (1986) memberikan contoh bahwa pekerja sosial dapat memerankan sebagai “fungsi kekuatan ketiga” untuk menjembatani antara anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya.. Hal ini berbeda dengan peran sebagai pembela di mana bantuan pekerja sosial diarahkan untuk memenangkan kasus klien atau membantu klien memenangkan dirinya sendiri.

Compton dan Galaway (1989) memberikan beberapa teknik dan keterampilan yang dapat digunakan dalam melakukan peran mediator:

1. Mencari persamaan nilai dari pihak-pihak yang terlibat konflik. Membantu setiap pihak

- agar mengakui legitimasi kepentingan pihak lain;
2. Membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mengidentifikasi kepentingan bersama;
 3. Menghindari situasi yang mengarah pada munculnya kondisi menang dan kalah;
 4. Melokalisir konflik ke dalam isu, waktu dan tempat yang spesifik;
 5. Membagi konflik ke dalam beberapa isu;
 6. Membantu pihak-pihak yang bertikai, menganjurkan agar mereka yang bertikai lebih memiliki manfaat. Apabila dapat melanjutkan sebuah hubungan dari pada terlibat terus dalam konflik;
 7. Memfasilitasi komunikasi dengan cara mendukung mereka, agar bersepakat satu sama lain, menyelesaikan masalah yang dihadapinya;
 8. Melakukan prosedur-prosedur persuasi.

Peran Pendamping Sosial Sebagai Pembela. Seringkali pekerja sosial harus berhadapan sistem politik, agar dapat menjamin kebutuhan dan sumber yang diperlukan, guna mencapai tujuan-tujuan pendampingan sosial. Manakala pelayanan dan sumber-sumber sulit dijangkau oleh klien, pekerja sosial harus memainkan peranan sebagai pembela (advokat). Peran pembelaan atau advokasi merupakan salah satu praktik pekerjaan sosial yang bersentuhan dengan kegiatan politik. Peran pembelaan dapat dibagi dua: advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi kausal (*cause advocacy*) (Parsons, Ruth J., 1994). Apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seorang klien secara individual maka ia berperan sebagai pembela kasus. Pembelaan kausal terjadi manakala klien yang dibela pekerja sosial bukanlah individu melainkan sekelompok anggota masyarakat.

Rothblatt (1978) memberikan beberapa model yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan peran pembela dalam pendampingan sosial:

1. Keterbukaan: membiarkan berbagai pandangan untuk didengar;
2. Perwakilan luas: mewakili semua pelaku yang memiliki kepentingan dalam pembuatan keputusan;
3. Keadilan: memperjuangkan sebuah sistem kesetaraan atau kesamaan sehingga posisi-posisi yang berbeda dapat diketahui sebagai bahan perbandingan;
4. Pengurangan permusuhan: mengembangkan sebuah keputusan yang mampu mengurangi permusuhan dan keterasingan;
5. Informasi: menyajikan masing-masing pandangan secara bersama dengan dukungan dokumen dan analisis;
6. Pendukung: mendukung partisipasi secara luas;
7. Kepekaan: mendorong para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap minat-minat dan posisi-posisi orang lain.

Peran pendamping Sosial sebagai Pelindung. Tanggung jawab pendamping sosial sebagai pekerja sosial terhadap masyarakat, didukung oleh hukum. Hukum tersebut memberikan legitimasi kepada pendamping sosial untuk menjadi pelindung (*protector*) terhadap orang-orang yang lemah dan rentan. Dalam melakukan peran sebagai pelindung (*guardian role*), pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang berisiko lainnya. peranan sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai kemampuan yang menyangkut: (1) kekuasaan, (2) pengaruh, (3) otoritas, dan (3) pengawasan sosial. Tugas-tugas peran pelindung meliputi:

1. Menentukan siapa klien pekerja sosial yang paling utama;
2. Menjamin bahwa tindakan dilakukan sesuai dengan proses perlindungan;
3. Berkomunikasi dengan semua pihak yang terpengaruh oleh tindakan sesuai dengan

tanggung jawab etis, legal dan rasional praktek pekerjaan sosial.

Peran profesi pekerja sosial yang sangat luas tidak harus dikembangkan hanya melalui Kementerian Sosial akan tetapi melalui insitusi lainnya seperti halnya lembaga kepolisian, kesehatan, hukum, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah maupun lembaga non pemerintah lainnya. Bagaimana menghidupkan semangat dan eksistensi profesi pekerja sosial dan aplikasi metode pekerjaan sosial di segala institusi, diharapkan keberadaan profesi pekerja sosial tersebut berada pada segmen institusi baik swasta maupun pemerintah, profesi pekerja sosial akan mendapat pengakuan keberadaanya apabila dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu kebutuhan. Menghadapi era otonomi daerah, keberadaan profesi pekerja sosial di setiap segmen akan memungkinkan tercapainya efektivitas dan efisiensi pembangunan kesejahteraan sosial serta terlepasnya egosentrisme instansi yang selama ini terjadi.

Strategi dan Program Kerja Pendamping Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pendampingan Sosial Seringkali dilakukan atau melibatkan dua strategi utama, yakni: (1) Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya juga meningkatkan keterampilan keluarga dalam mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan hidupnya; dan (2) Advokasi adalah bentuk keberpihakan pekerja sosial terhadap kehidupan masyarakat yang diekspresikan melalui serangkaian tindakan politis yang dilakukan secara terorganisir. Tujuan advokasi adalah untuk mencapai perubahan kebijakan tertentu yang bermanfaat. Terdapat lima aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pendampingan

sosial, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat.

1. Motivasi. Masyarakat didorong agar dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Misalnya, keluarga-keluarga miskin didorong untuk membentuk kelompok;
2. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan. Peningkatan kesadaran masyarakat, dicapai melalui pendidikan dasar pemasyarakatan imunisasi dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan vokasional dikembangkan melalui cara-cara partisipasi;
3. Manajemen diri. Kelompok harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri;
4. Mobilisasi sumber. Merupakan sebuah metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tanggungan reguler dan sumbangan sukarela bertujuan menciptakan modal sosial;
5. Pembangunan dan pengembangan jaringan. Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.

Pengembangan Masyarakat (PM) adalah proses membantu orang-orang biasa agar dapat memperbaiki masyarakatnya melalui tindakan-tindakan kolektif (Twelvetrees, 1992). Secara akademis, PM dikenal sebagai salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip

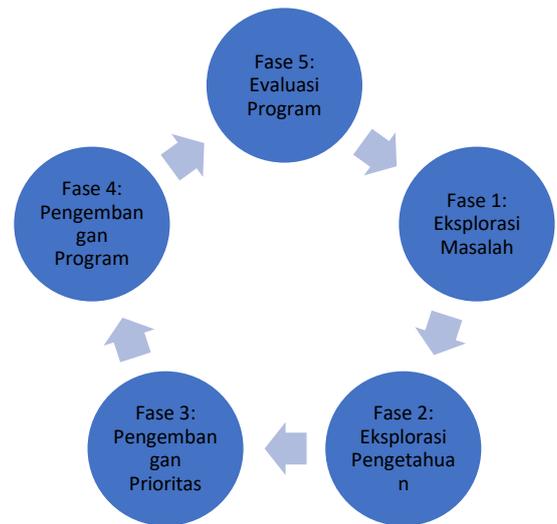
partisipasi sosial (Suharto, 2010) Penerima Manfaat merupakan spesialisasi atau setting praktek pekerjaan sosial yang bersifat makro (*macro practice*).

Pengembangan masyarakat secara umum meliputi perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program atau proyek kemasyarakatan. Sebagai suatu kegiatan kolektif, PM melibatkan beberapa aktor, seperti Pekerja Sosial, masyarakat setempat, lembaga donor serta instansi terkait, yang saling berkerjasama mulai dari perancangan, pelaksanaan, sampai evaluasi terhadap program atau proyek tersebut (Suharto, 2014). Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni “membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri”, PM sangat memperhatikan pentingnya partisipasi sosial dan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, dan bahkan dalam hampir semua praktik pekerjaan sosial, peranan seorang *community worker* seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah (*problem solver*) secara langsung. Dalam konteks PM, pendampingan sosial berpusat pada tiga visi praktek pekerjaan sosial, yang dapat diringkas sebagai 3P, yaitu: pemungkin (*enabling*) pendukung (*supporting*), dan pelindung (*protecting*). Merujuk pada Payne, prinsip utama pendampingan sosial adalah “making the best of the client’s resources” (Payne, 1991). Dalam pendampingan sosial, klien dan lingkungannya tidak dipandang sebagai sistem yang pasif dan tidak memiliki potensi apa-apa.

Salah satu kerangka kerja pemberdayaan masyarakat yang dapat diterapkan dalam proses pendampingan sosial adalah Teknik PPM (*Programme Planning Model*) yang juga dikenal dengan sebutan Proses Kelompok Nominal (PKN). Perencanaan sangat memperhatikan proses dan situasi di mana berbagai kelompok

yang terbagi berdasarkan keahlian, kepentingan, maupun konsep retorik dan ideologis dilibatkan bersama dalam merancang sebuah program atau perubahan sosial. Secara ringkas, proses PPM sebagai berikut:

Gambar 3.
Proses Pendampingan sosial Teknik PPM
(*Programme Planning Model*)



1. Fase 1: Eksplorasi Masalah
 - a. Pelibatan kelompok-kelompok klien atau konsumen.
 - b. Pelibatan pendamping sebagai supervisor garis depan.
2. Fase 2: Eksplorasi Pengetahuan
 - a. Pelibatan ilmuwan luar (bukan dari masyarakat setempat)
 - b. Pelibatan ahli organisasi dalam dan luar.
 - c. Pelibatan pendamping sebagai penghubung antara pihak luar dan masyarakat setempat.
3. Fase 3: Pengembangan Prioritas
 - a. Pelibatan para pengawas sumber.
 - b. Pelibatan administrator kunci.
 - c. Pelibatan pendamping sebagai pemberi masukan terhadap keputusan.
4. Fase 4: Pengembangan Program
 - a. Pelibatan administrator-administrator lini.
 - b. Pelibatan ahli teknis.

- c. Pelibatan pendamping sebagai pemberi masukan.
5. Fase 5: Evaluasi Program
- a. Pelibatan kelompok-kelompok klien atau konsumen.
 - b. Pelibatan staf dan petugas administrasi.
 - c. Pelibatan pendamping sebagai pemberi masukan. (Suharto, 2007)

Kerangka ini dapat pula diterapkan secara khusus dalam konteks Pengembangan masyarakat. Pendampingan sosial berpijak pada paradigma generalis (Dubois & Miley, 2005) memfokuskan pada konsultasi pemecahan masalah, manajemen sumber dan pendidikan. Sementara itu, peranan pekerja sosial sebagai pendamping akan dikontekstualkan sebagai fasilitator atau pemungkin, broker, mediator, pembela, dan pelindung.

Strategi dan peranan pekerja sosial sebagai pendamping sosial dalam menjalankan fungsi, peran dan strategi, dapat dilihat sebagai berikut: Fungsi Konsultasi dalam pemecahan masalah berperan sebagai fasilitator, pembela. Strategi pelindung melalui penelitian dan perencanaan. Peranan pekerja sosial dalam penanganan masalah serta pendampingan sosial berfungsi sebagai konsultan dalam pemecahan masalah, tidak hanya dilakukan dengan profesi lain (dokter, guru), melainkan dengan sistem klien. Konsultasi dapat berupa pemberian dan penerimaan saran, melainkan merupakan proses yang ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pilihan-pilihan dan mengidentifikasi prosedur bagi tindakan yang diperlukan.

Konsultasi yang dilakukan oleh pekerja sosial sebagai bagian dari kerjasama yang saling melengkapi antara sistem klien dan pekerja sosial dalam proses pemecahan masalah. Pekerja sosial membagi secara formal pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya, sedangkan klien membagi pengalaman personal, organisasi atau

kemasyarakatan yang pernah diperoleh semasa hidupnya. Dalam proses pemecahan masalah, pendampingan sosial dapat dilakukan melalui serangkaian tahapan yang biasa dilakukan dalam praktik pekerjaan sosial pada umumnya, yaitu: pemahaman kebutuhan, perencanaan dan penyeleksian program, penerapan program, evaluasi dan pengakhiran.

Strategi Profesi Pekerja Sosial dalam Pendampingan Sosial

Peran pekerja sosial dalam melakukan pendampingan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam kelompok agar memecahkan masalah. Semakin berkembangnya permasalahan sosial seiring dengan perubahan sosial global tentu akan semakin membutuhkan kehadiran pekerja sosial profesional sebagai seorang pendamping. Karena itu strategi pendekatan pekerjaan sosial harus semakin sistemik, holistik, dan komprehensif. Strategi pekerja sosial dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui memotivasi masyarakat terlibat dalam kegiatan kelompok. Pekerja sosial mendampingi dalam meningkatkan kemampuan yang dimiliki (potensi) dan sumber daya yang dimiliki masyarakat. Pekerja sosial berupaya untuk meningkatkan kesadaran melalui sosialisasi dan pemberian keterampilan, pendidikan dan latihan dengan cara partisipatif. Pekerja sosial menciptakan suasana kondusif agar mereka mampu meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka sendiri. Peran pekerja sosial sebagai pendamping dengan memobilisasi sumber dan potensi kesejahteraan sosial, termasuk pendampingan berorganisasi dengan melibatkan seluruh masyarakat. Pekerja sosial sebagai pendamping akan lebih dikenal jika sungguh-sungguh menguasai tiga kerangka dasar profesi tersebut yaitu kerangka keilmuan (*body of knowledge*), kerangka nilai (*body of value*), dan kerangka praktek (*body of skill*)

(Trevithick, 2008). Pendamping sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial dilakukan dengan pendekatan metoda pekerjaan sosial yang paling tepat yaitu metoda pengembangan masyarakat (*community development*), metoda bekerja dengan perorangan (*case work*) dan metoda kebijakan sosial (*social policy*). Pendampingan masyarakat yang dilakukan pekerja sosial dapat dilaksanakan berskala lokal baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga swadaya masyarakat. Strategi pendampingan pekerja sosial melalui strategi pendekatan masyarakat untuk meningkatkan standar hidup berskala lokal. Strategi pendampingan untuk menggali kesadaran masyarakat melakukan aksi sosial, mengelola lingkungan; serta meningkatkan motivasi masyarakat untuk mencari solusi terhadap pemenuhan kebutuhan sosial. Profesi pekerja sosial mengarah kepada profesionalisme menjadi tuntutan dan sebagai pendamping harus memiliki kompetensi yang tersertifikasi oleh lembaga profesi pekerja sosial yang telah dibentuk pemerintah.

PENUTUP

Peran pekerja sosial dalam melakukan pendampingan mengarahkan pembangunan kesejahteraan sosial, dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Strategi pendampingan pekerja sosial melalui strategi pendekatan masyarakat untuk meningkatkan standar hidup berskala lokal. Strategi pendampingan untuk menggali kesadaran masyarakat melakukan aksi sosial, mengelola lingkungan; serta meningkatkan motivasi masyarakat untuk mencari solusi terhadap pemenuhan kebutuhan sosial. Profesi pekerja sosial mengarah kepada profesionalisme menjadi tuntutan dan sebagai pendamping harus memiliki kompetensi yang tersertifikasi oleh lembaga profesi pekerja sosial yang telah dibentuk pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Elly Kumari Tjahya Putri, dari lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan masukan mengenai peran pendamping bagi profesi pekerja sosial, sehingga naskah ini dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barker, R. L. (2017). The social work dictionary 6th edition. In *Social Work Research*.
<https://doi.org/10.1093/swr/svx002>
- Boehm, W. W. (1958). The nature of social work. *Social Work (United States)*.
<https://doi.org/10.1093/sw/3.2.10>
- Dubois, B. L., & Miley, K. K. (2005). Social Work :An Empowering Profession. *Social Work: An Empowering Profession (Th Edition)*.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. PT Refika Aditama.
- Friedlander, W. . (1961). *Introduction to Sosial Welfare*,. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs,.
- Greene, R. R. (2017). Human behavior theory and social work practice. In *Human Behavior Theory and Social Work Practice*.
<https://doi.org/10.4324/9781351327404>
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Kelan, E. K. (2008). Emotions in a rational profession: The gendering of skills in ICT work. *Gender, Work and Organization*.
<https://doi.org/10.1111/j.1468-0432.2007.00355.x>
- Maluccio N., A., & Libassi F., M. (1984). Competence clarification in social work

- practice. *Social Thought*.
- Midgley, J. (2017). Social Development: Theory and Practice. In *Social Development: Theory and Practice*. <https://doi.org/10.4135/9781446294987>
- Midgley, J., & Conley, A. (2010). Social Work and Social Development: Theories and Skills for Developmental Social Work. In *Social Work and Social Development: Theories and Skills for Developmental Social Work*. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199732326.001.0001>
- Minahan, A., & Pincus, A. (1977). Conceptual framework for social work practice. *Social Work (United States)*. <https://doi.org/10.1093/sw/22.5.347>
- Parsons, Ruth J., J. D. J. dan S. H. H. (1994). *The Integration of Sosial Work Practice*, : Brooks/ColePayne, Malcolm (1986), Sosial care in The Community, London: MacMillan.
- Payne, M. (1991). Modern Social Work Theory. In *Modern Social Work Theory*. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-21161-6>
- Reamer, F. G. (2012). Social Work. In *Encyclopedia of Applied Ethics*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-373932-2.00415-4>
- Siporin, M. (1993). The social worker's style. *Clinical Social Work Journal*. <https://doi.org/10.1007/BF00756370>
- Suharto, E. (2010). Pengembangan Masyarakat dari pembangunan Sampai Pemberdayaan. In *refika editama*.
- Suharto, E. (2014). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangun. *Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya*.
- Trevithick, P. (2008). Revisiting the knowledge base of social work: A framework for practice. *British Journal of Social Work*. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcm026>
- Twelvetrees, J. (1992). Book Reviews : Sandra Butler and Claire Wintram (1991) *Feminist Group Work*. London: Sage. 200 pp. £10.95 paperback, £30.00 hardback. *International Social Work*. <https://doi.org/10.1177/002087289203500312>
- Zastrow, C. H. (1978). Introduction to social welfare institutions: Social problems, services, and current issues. *Social Work (United States)*. <https://doi.org/10.1093/sw/23.3.258-a>